

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kebijakan publik yang efektif merupakan tujuan dari setiap organisasi maupun instansi pemerintahan yang ada. Kebijakan publik sendiri merupakan sebuah alat yang dapat digunakan guna mencapai tujuan publik. Menurut E. Anderson (dalam Suwitri, 2014) Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang dapat berupa program-program pemerintah guna mencapai suatu tujuan. Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah atau aktor-aktor pemerintah.

Kebijakan publik erat kaitanya dengan kepentingan publik. Oleh karena itu maka selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang pada akhirnya akan dijalankan oleh birokrasi yang ada di pemerintah. Dalam pelaksanaanya kebijakan publik memiliki salah satu fokus utama yaitu guna melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri merupakan semua bentuk pelayanan baik dalam bentuk jasa publik maupun barang

Pelayanan publik di Indonesia sendiri menurut Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 dilakukan oleh penyelenggara negara, korporasi dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang undang. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggara negara/instansi pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban guna melayani warga negara. Lebih lanjut menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara nomor 3 tahun 2020 menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik ditentukan oleh pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hal tersebut maka Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan kepada Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian maka selain menjaga ketertiban dan juga keamanan pihak Kepolisian juga menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dimulai dari jajaran pusat hingga jajaran terendah. Salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan melibatkan adanya partisipasi dari masyarakat adalah pengajuan Surat Izin Mengemudi.

Berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 1992 setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi. Kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi menjadikan layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Kepolisian menjadi salah satu layanan yang dipadati di Indonesia. Kepadatan tersebut juga didukung dengan banyaknya pengguna maupun pengendara kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) maupun kendaraan roda 4 (empat) di Indonesia.

Tabel 1, Jumlah Kendaraan Badan Pusat Statistik

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan		
	2016	2017	2018
Mobil Penumpang	14.580.666,00	15.423.968,00	16.44. 987,00
Mobil Bis	2.486.898,00	2.509.258,00	2.538.182,00
Mobil Barang	7.063.433,00	7.289.910,00	7.778.544,00
Sepeda Motor	105.150.082,00	111.988.683,00	120.101.047,00
Jumlah	129.281.079,00	137.211.818,00	146.858.759,00

Kenaikan kendaraan bermotor yang mencapai 10-15% di Indonesia menjadikan kepadatan lalu lintas semakin parah (Badan Pusat Statistik, 2019). Kepadatan tersebut tentu juga berbanding lurus dengan pengendara motor yang semakin banyak disertai dengan bertambahnya pemohon pembuat Surat Izin Mengemudi. Dengan adanya data tersebut juga mendorong pihak Kepolisian guna melakukan inovasi dalam hal pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Indonesia.

Memasuki tahun 2020 dimana pandemi covid-19 menyerang dunia termasuk di Indonesia menuntut pihak Kepolisian Republik Indonesia guna membuat aturan dan protokol baru dalam hal pelayanan Surat Izin Mengemudi. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi penegak hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan sebuah inovasi bernama SIMMADE (SIM Masuk Desa). SIM Masuk Desa sendiri merupakan sebuah gebrakan baru didalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi tipe C dan

perpanjangan Surat Izin Mengemudi tipe A & C di wilayah hukum Polda DIY dengan menggunakan sistem jemput bola di Desa terpilih.

Pelaksanaan SIMMADE di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta secara serentak dilakukan di seluruh jajaran Kepolisian Resort yang berada dibawah naungan Polda Yogyakarta. Kepolisian Resort Bantul selaku instansi yang berada di bawah jajaran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai pada bulan september tahun 2020 menerapkan kebijakan SIMMADE kepada 4 desa terpilih. Adapun desa yang dipilih oleh Kepolisian Resort Bantul beserta jadwal meliputi :

Tabel II, Jadwal pelaksanaan SIMMADE Bantul

Tempat	Jam	Hari
Seloharjo	08.00-12.00	Kamis, minggu pertama
Wukirsari	08.00-12.00	Kamis, minggu kedua
Argosari	08.00-12.00	Kamis, minggu ketiga
Banguntapan	08.00-12.00	Kamis, minggu keempat

Pelaksanaan SIMMADE yang merupakan kebijakan baru di wilayah hukum Polres Bantul merupakan sebuah inovasi sekaligus langkah besar guna memperluas akses bagi masyarakat yang akan mengakses pelayanan Surat Izin Mengemudi. Walaupun demikian kebijakan yang baru saja diluncurkan tentu masih memiliki kekurangan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berminat untuk meneliti mengenai pengaruh fasilitas, transparansi, partisipasi dan sumber

daya manusia terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE (SIM Masuk Desa) di Kabupaten Bantul.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

- a. Sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan SIMMADE?
- b. Sejauh mana pengaruh fasilitas, transparansi, partisipasi dan sumber daya manusia terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pengaruh fasilitas, transparansi, partisipasi dan sumber daya manusia terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE (SIM Masuk Desa) di Kabupaten Bantul
- b. Mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan SIMMADE dalam rangka mempermudah dan memperluas penerbitan SIM di Kabupaten Bantul.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai referensi serta pijakan bagi penelitian selanjutnya terutama bagi penelitian yang berhubungan dengan efektivitas kebijakan publik di Kabupaten Bantul.

- b. Memberi masukan bagi instansi terkait terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik serta pengembangan Ilmu Pemerintahan terkhusus dalam kajian efektivitas kebijakan publik
- c. Memberikan saran serta masukan kepada instansi terkait guna terus melakukan segala tugas dengan lebih baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah terkait.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sebagai rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Kepolisian Resort Bantul dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik guna menciptakan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

Nila (2019) meneliti dengan metode penelitian kuantitatif mengenai kualitas pelayanan pembuatan SIM pada Satlantas Polrestabes Medan tahun 2018. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari beberapa aspek seperti *tangible*, *reliability*, *responsive*, *assurance*, serta *emphaty* menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembuatan SIM pada Satlantas Polrestabes Medan terhadap kepuasan pelanggan adalah sangat puas dengan presentase sebesar 22,9%.

Sujianto (2017) dengan metode kualitatif meneliti mengenai pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak Kepolisian lebih yaitu pada Satpas SIM (Surat Izin Mengemudi) kendaraan roda empat yang terletak di wilayah Polresta Pekanbaru tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa aspek penyelenggaraan pembuatan Surat Izin

Mengemudi A menunjukkan bahwa aspek ketepatan waktu masih belum terselenggara secara maksimal sehingga mempengaruhi kepuasan dari masyarakat.

Nia (2019) dalam penelitiannya mengenai kualitas pelayanan pada satuan penyelenggara administrasi pemuatan Surat Izin Mengemudi Polres Bangkalan Balai 2019. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan indikator kemampuan, sikap, penampilan, akuntabilitas dan tindakan, penyelenggaraan administrasi pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Bangkalan Balai memperoleh skor baik.

Deby (2018) pada tahun 2018 meneliti tentang efektifitas inovasi kebijakan publik dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan. Studi tersebut memperoleh kesimpulan bahwa kuantitas inovasi belum efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hal tersebut dibarengi dengan iklim inovasi yang masih buruk dan juga nilai inovasi yang belum terinternalisasi dengan efektif.

Goni & Yuliana Yunita (2016) meneliti mengenai efektivitas pelayanan Surat Izin Mengemudi pada Satlantas Kepolisian Resor Manado. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa faktor kepemimpinan organisasi merupakan faktor yang menunjang dalam capaian kinerja pelayanan. Hal tersebut tercermin dengan adanya kerjasama yang baik antara bawahan dengan pimpinan dan juga ditunjang dengan kesejahteraan anggota kepolisian yang baik sehingga memicu pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Hidayati (2014) menggunakan metode penelitian kualitatif meneliti mengenai efektivitas pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kepolisian Resort Mojokerto pada tahun 2014. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pelayanan yang dilakukan belum efektif baik dari sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung. Petugas Kepolisian yang bertugas guna melayani masyarakat belum melaksanakan tata

cara pelayanan sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu fasilitas pendukung seperti ruang tunggu dan ruang ujian juga belum memadai.

Zulyansyah (2019) melakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif pada tahun 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zulyansyah (2019) memperoleh hasil bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Paser dalam hal penerbitan SIM sudah berjalan dengan efektif. Pelayanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 dalam berbagai tahapan yang dilalui

Herlina (2017) dalam penelitiannya yang berjudul faktor pendukung pelayanan pembuatan SIM di wilayah Kepolisian Resort Surabaya menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung kinerja birokrasi yang dapat dilihat dari indikator kemampuan aparatur, kualitas sumber daya manusia, dukungan pemerintah, dan kondisi kerja dalam memberikan kualitas pelayanan yang prima dan profesional.

Penelitian yang berjudul Implementasi Surat Izin Mengemudi (Sim) di Satuan Penyelenggara Administrasi Sim (Satpas) Colombo Surabaya yang dilakukan oleh Nurabdi & Prabawati (2017) menyatakan bahwa kebijakan pembuatan SIM secara online sudah berjalan secara baik. Walaupun dalam pelaksanaan sudah berjalan secara baik tetapi masih terdapat beberapa kendala yang ditemui seperti koneksi internet yang masih buruk dan juga renovasi gedung yang mengganggu dan membahayakan masyarakat yang akan mengajukan pembuatan SIM.

Setyaningsih (2009) menggunakan metode penelitian kualitatif melakukan penelitian dengan judul Kualitas Pelayanan Di Kantor Urusan Sim Satlantas Polres Sragen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan di kantor urusan SIM Satlantas

Polres Sragen masih mengecewakan. Kualitas pelayanan belum sesuai dengan harapan pengguna jasa meliputi sektor kejelasan biaya, ketepatan waktu dan juga masih ditemukannya tindakan pungutan liar.

Yulita (2019) melakukan penelitian mengenai kualitas pelayanan publik yang dilakukan kepada mobil unit pelayanan SIM keliling Kota Pekanbaru. Dalam penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Secara keseluruhan diperoleh hasil bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Satlantas Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan pada beberapa indikator seperti sarana dan prasarana yang belum mendukung dengan baik serta kurangnya petugas yang bertanggungjawab dalam proses perpanjangan SIM.

Hilma S(2018) dalam penelitiannya yang bertemakan pelayanan SIM oleh Polresta Pekanbaru memperoleh hasil yang bagus dalam hal pelayanan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Walaupun sudah berjalan dengan baik namun terdapat kekurangan dalam hal sarana dan prasarana dimana kurang memadai ataupun kurang baik sehingga menghambat pelayanan

Handrian (2019) melakukan sebuah penelitian dengan judul pengaruh reformasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan pembuatan SIM C Polresta Pekanbaru. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dari penelitian diatas diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh reformasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik terkhusus pada Satpas SIM Polresta Pekanbaru.

Kushardianto & Santoso (Kushardianto & Santoso, 2010) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melakukan sebuah penelitian mengenai Sistem Informasi Pembuatan SIM pada Instansi Kepolisian. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa

penerapan sistem informasi berhasil diimplementasikan. Penerapan sistem informasi dalam pembuatan SIM juga memiliki beberapa keunggulan diantaranya dapat meminimalisir adanya tindakan pungli yang dilakukan oleh petugas, menghasilkan suatu transparansi dalam pelaksanaan, dan mempermudah masyarakat guna mengakses pelayanan serta mengurangi penggunaan kertas dalam setiap tahapannya yang ada.

Mahfudhoh (2019) dalam penelitiannya mengenai sistem pelayanan pembuatan SIM Satlantas Jombang memperoleh hasil sebagai berikut. Satlantas Polres Jombang sudah melakukan pelayanan dengan baik dan juga didukung fasilitas yang sudah memadai. Dengan adanya pelayanan yang baik serta fasilitas yang lengkap diharapkan mampu mendorong keinginan masyarakat guna melengkapi kelengkapan berkendara berupa SIM.

Syach (2019) melakukan penelitian mengenai pelayanan publik dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi pada tahun 2019. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif guna memperoleh data penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan Syach menyatakan bahwa dalam pelayanannya Kepolisian Republik Indonesia selaku satu-satunya instansi pemerintah yang bertugas menerbitkan Surat Izin Mengemudi telah menerapkan standar pelayanan yang bagus. Didalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi juga telah mencerminkan peryaratan yang marang bagi pemohon.

Pada tahun 2018 terdapat sebuah penelitian yang berjudul tanggapan masyarakat dalam proses pelayanan SIM di Polres Bantul. Dalam penelitian tersebut Salfarosa (2018) sebagai peneliti menemukan sebuah kesimpulan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bantul sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dalam hal pelayanan masih bisa ditingkatkan terutama mengenai keramahan petugas kepada pemohon. Dari beberapa

Namun demikian dari banyaknya penelitian terdahulu hanya mengungkap beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas layanan pembuatan SIM yang berada di Kepolisian secara konvensional. Sedangkan di era modern seperti sekarang Kepolisian khususnya Kepolisian Resort Bantul telah meluncurkan kebijakan baru berupa penerbitan SIM yang dilakukan di Desa yaitu melalui kebijakan SIMMADE. Dari ulasan tersebut menunjukkan adanya gap atau kekosongan ilmu pengetahuan dalam penelitian tentang pengaruh fasilitas, transparansi, partisipasi dan sumber daya manusia terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE (SIM Masuk Desa) di Kabupaten Bantul.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Efektivitas

1.6.1.1 Pengertian Efektivitas

Dari segi bahasa kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *effective*. Kata tersebut dapat diartikan sebagai suatu tingkat keberhasilan atau sesuatu yang dilakukan dan berhasil dengan baik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Efektivitas sendiri berasal dari kata efektif yang mempunyai arti sebagai pengaruh, efek, akibat atau pembawa hasil. Efektivitas sendiri merupakan salah satu unsur pokok guna mencapai sasaran maupun tujuan yang sudah ditetapkan dalam suatu organisasi dalam bentuk kebijakan maupun program (Savinatunazah, 2017). Suatu Kegiatan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai sasaran maupun tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Kristanto (Dalam Irwansyah, 2017) efektifitas merupakan sebuah indikator yang digunakan guna mengukur seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan serta sejauh mana target tersebut dapat dicapai. Selain itu menurut Kurniawan (dalam Irwansyah, 2017) efektifitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan fungsi maupun tugas dalam suatu organisasi maupun instansi tanpa adanya suatu paksaan, dorongan maupun tekanan didalam pelaksanaan.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai hubungan output dengan tujuan yang sudah dirumuskan dalam organisasi maupun instansi. Semakin tinggi/besar kontribusi yang disumbang output terhadap tercapainya tujuan maka dapat diartikan bahwa organisasi maupun instansi tersebut semakin efektif dalam hal pelaksanaan kegiatan maupun program yang ada (Mahmudi, 2015). Sementara itu menurut Amal (2017) menyatakan bahwa efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dan juga merupakan upaya atau kegiatan yang telah terarah dan ada tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, efektivitas merupakan perbandingan capaian hasil program dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya atau membandingkan keluaran dengan outcome. Outcome sendiri dapat dilihat sebagai segala sesuatu yang mencerminkan fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (Zulfah, 2017). Dari hal tersebut maka efektivitas dapat digunakan sebagai standar pengukuran guna menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi.

Efektivitas sendiri juga dapat didefinisikan dengan 4 (Empat) hal (Mutiarin et al., 2018), yaitu :

1. Mengerjakan hal yang benar dan sesuai dengan rencana serta aturan
2. Mampu mencapai tingkat diatas pesaing dan menjadi yang terbaik
3. Membawa hasil yang bermanfaat

4. Menangani tantangan masa depan

Dari beberapa pendapat dan ulasan terkait pengertian efektifitas yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa efektifitas dapat diartikan sebagai sebuah pengukuran tingkat pencapaian dari target yang sebelumnya telah direncanakan. Efektivitas juga merupakan keberhasilan dari suatu kegiatan yang telah berjalan sesuai dengan target yang sudah ada maupun ditetapkan sebagai tujuan dalam suatu organisasi maupun instansi. Efektivitas juga merupakan efek ataupun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan maupun implementasi kegiatan.

1.6.1.2 Ukuran Efektivitas

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan sebuah pengukuran tingkat keberhasilan dalam suatu kegiatan dalam organisasi atau instansi. Pengukuran tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan target yang ditetapkan sebelum kegiatan akan dilaksanakan dengan hasil akhir dari kegiatan tersebut. Menurut Senoaji (dalam Yuliantini, 2018) dari perbandingan tersebut apabila target yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil akhir kegiatan maka kegiatan tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif.

Menurut Campbell (dalam Pratiwi, 2017) terdapat beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program guna menilai tingkat efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan diantaranya :

1. Keberhasilan pelaksanaan program : dapat diartikan sebagai kemampuan guna melaksanakan program baik organisasi, pemerintah maupun SKPD guna menghadapi suatu permasalahan dan melakukan implementasi dalam pencapaian keberhasilan program.
2. Keberhasilan sasaran : Merupakan keberhasilan kegiatan ataupun program dalam pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Kepuasan program : Merupakan pengukuran kepuasan yang dirasakan oleh sasaran dalam suatu kegiatan ataupun program.
4. Tingkat input maupun output : Output dan input merupakan hasil akhir dari pelaksanaan program berupa bentuk fisik dari kegiatan.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh : Tercapainya tujuan secara keseluruhan dalam program merupakan cerminan dari bentuk keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program.

Menurut Siagan (dalam Pratiwi, 2017) bahwa pengukuran tingkat efektivitas juga dapat dilihat dari 8 (delapan) kriteria maupun ciri-ciri yang diantaranya adalah :

1. Tercapainya tujuan dan sasaran : Dapat dilihat dengan membandingkan tujuan dan sasaran kegiatan ataupun program

yang dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan bersama.

2. Kejelasan strategi guna mencapai tujuan : Dapat dilihat dengan membandingkan tujuan yang hendak dicapai serta upaya mencapai sasaran.
3. Proses analisis serta perumusan kebijakan : Dalam menganalisis serta merumuskan suatu kebijakan harus mampu menghubungkan tujuan dan usaha dalam pelaksanaan operasional.
4. Perencanaan yang matang dan terarah
5. Penjabaran kegiatan melalui program-program yang tepat sasaran
6. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung
7. Pelaksanaan kegiatan serta peogram berjalan sesuai serta efektif dan efisien
8. Terdapat pengawasan dan pengendalian yang matang guna mengawasi pelaksanaan program

Dalam melihat tolak ukur atau mengukur efektivitas dapat dilihat dari berbagai sisi dan tergantung pula siapa yang melihat, menilai dan menginterpretasikan penilaian tersebut. Pengukuran efektivitas menurut Narayanan dan Nath (dalam Al-Hamdi, 2017) terdapat 4 kriteria dalam pengukuran efektivitas. Adapun kriteria tersebut diantaranya diantaranya :

1. Kejelasan tujuan
2. Adanya hubungan/korelasi antara output yang dihasilkan dengan input
3. Adanya sebuah keterikatan antara input, proses pelaksanaan serta output
4. Kemudahan dalam menentukan kriteria

1.6.2 Fasilitas pendukung mempengaruhi Efektivitas pelaksanaan SIMMADE (Sim Masuk Desa) dalam mempermudah dan memperluas jangkauan penerbitan sim di Kabupaten Bantul

Menurut Tjiptono (dalam Mutaqin, 2016) fasilitas merupakan salah satu sumber daya fisik yang harus dimiliki oleh instansi pemerintahan sebelum jasa pelayanan ditawarkan kepada masyarakat. Fasilitas juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang berfungsi untuk menambah nilai dari layanan jasa. Kelengkapan fasilitas, kondisi fasilitas dan kebersihan fasilitas yang ada didalam suatu pelayanan harus dipertimbangkan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan fasilitas dalam suatu pelayanan sangat penting dan berkaitan sangat erat dengan kepuasan konsumen dalam pelayanan yang ada.

Keterkaitan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat mengenai kelengkapan dan kenyamanan fasilitas sehingga menumbuhkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (Soputan et al., 2015). Dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang digunakan ataupun disediakan oleh instansi pemerintah dalam kerangka pelayanan kepada masyarakat memiliki pengaruh dalam efektivitas pelaksanaan suatu pelayanan kepada masyarakat.

1.6.3 Transparansi mempengaruhi Efektivitas pelaksanaan SIMMADE (Sim Masuk Desa) dalam mempermudah dan memperluas jangkauan penerbitan sim di Kabupaten Bantul

Dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah saat ini konsep transparansi merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Keterbukaan informasi yang baik dilaksanakan dalam rangka mewujudkan konsep *good governance* yang memiliki kaitan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat maupun pihak swasta. Menurut Dwiyanto(dalam Arnita, 2019) terdapat tiga indikator transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu keterbukaan seluruh proses pelayanan, kemudahan masyarakat guna memahami peraturan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai berbagai aspek pelayanan publik.

Kemudahan mengakses informasi bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat (Fikriyani, 2019). Transparansi merupakan suatu konsep yang merujuk kepada keterbukaan yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat diakses oleh publik (Ega, 2019). Berkaca kepada tuntutan keterbukaan dan juga penerapan konsep *good governance* maka transparansi memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas pelaksanaan sebuah pelayanan publik

1.6.4 Partisipasi Masyarakat mempengaruhi Efektivitas pelaksanaan SIMMADE (Sim Masuk Desa) dalam mempermudah dan memperluas jangkauan penerbitan sim di Kabupaten Bantul

Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat berjalan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan. Partisipasi masyarakat menurut Tjokroamidjojo (dalam Arwanto, 2017) menjelaskan bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam kerangka meningkatkan efektivitas pelayanan dan juga cerminan proses demokrasi yang baik.

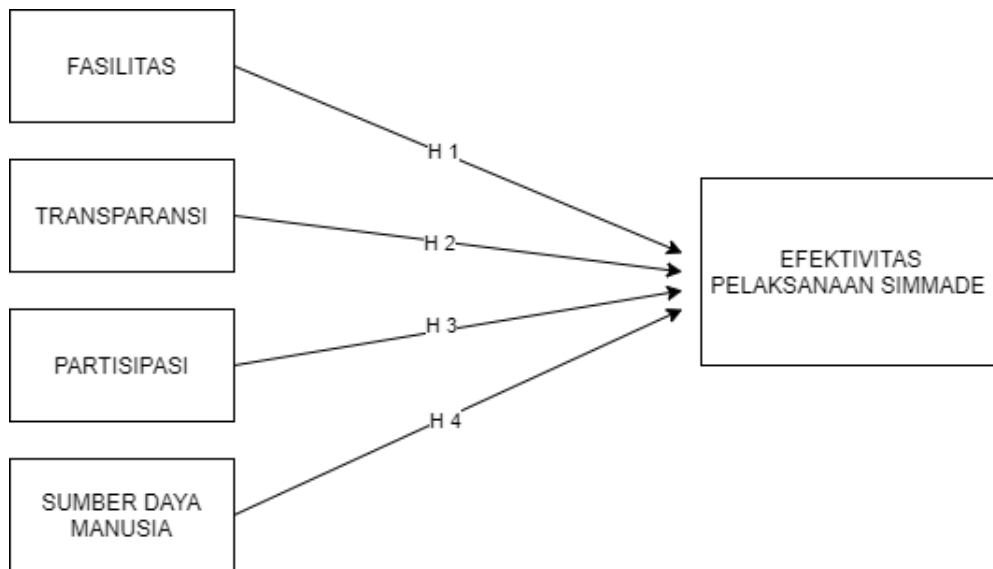
Dalam kerangka efektivitas tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebuah instrumen dan juga alat guna mencapai program, kebijakan maupun pelayanan publik yang prima dari pemerintah kepada masyarakat (Boby Salihin, 2020). Dalam menilai tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keaktifan, tanggung jawab, serta ketersediaan masyarakat dalam memberikan ide kepada pemerintah. ketiga aspek tersebut sangat penting dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain serta memiliki faktor pendukung dalam pelaksanaannya (Rohan, 2019). Faktor pendukung terbesar merupakan kesempatan dimana masyarakat memiliki kesempatan yang besar dalam berpartisipasi dalam segala bentuk pelayanan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

1.6.5 Sumber Daya Manusia mempengaruhi Efektivitas pelaksanaan SIMMADE (Sim Masuk Desa) dalam mempermudah dan memperluas jangkauan penerbitan sim di Kabupaten Bantul.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan efektivitas pelayanan publik secara maksimal maka sumber daya manusia merupakan salah satu sektor yang harus diperhatikan. Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur publik dalam bidang pelayanan memiliki peran strategis sebagai pendorong dalam terciptanya reformasi birokrasi dalam sektor pelayanan publik (Akhmad, 2016). Untuk mencapai hal tersebut maka kualitas dari sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pada seluruh instansi pemerintah sehingga memiliki pengaruh dalam efektivitas pelayanan publik.

Mengingat besarnya peranan aparatur dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat maka sikap, perilaku, keterampilan dan profesionalisme aparat dalam melaksanakan tugas sangat menentukan keberhasilan dan efektivitas suatu pelayanan (Mohram, 2014). Dengan demikian maka sumber daya manusia dalam suatu pelayanan mempunyai peranan vital dalam keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia juga dapat digunakan guna mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan pelayanan suatu organisasi.

Gambar Kerangka Teoritik.



1.7 Hipotesa Penelitian

H1: Fasilitas Pendukung mempengaruhi Efektivitas pelaksanaan SIMMADE (Sim Masuk Desa)

H2: Transparansi mempengaruhi Efektivitas pelaksanaan SIMMADE (Sim Masuk Desa)

H3: Partisipasi Masyarakat mempengaruhi Efektivitas pelaksanaan SIMMADE (Sim Masuk Desa)

H4: Sumber Daya Manusia mempengaruhi Efektivitas pelaksanaan SIMMADE (Sim Masuk Desa)

1.8 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan batasan terkait setiap variable masalah yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian sehingga dapat memudahkan para penulis atau peneliti untuk langsung penelitian di lapangan. Pada penelitian ini maka ada beberapa definisi konseptual yaitu:

1) Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Fasilitas pendukung dalam pelaksanaan SIMMADE mencakup tersedianya ruang tunggu yang memadai bagi peserta, tersedianya ruang/tempat untuk melaksanakan ujian baik praktik maupun tertulis serta tersedianya koneksi internet yang baik guna melaksanakan ujian tertulis.

2) Transparansi

Dalam pelaksanaan kebijakan SIMMADE memerlukan adanya transparansi dalam setiap langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama masyarakat selaku pemohon. Transparansi dalam pelaksanaan SIMMADE merupakan adanya keterbukaan dalam setiap langkah atau keterbukaan proses. Keterbukaan tersebut dapat mencakup keterbukaan biaya, keterbukaan informasi dan keterbukaan dalam penilaian pembuatan Surat Izin Mengemudi.

3) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik melalui pelayanan publik merupakan suatu hal yang penting dalam

melihat efektivitas pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan SIMMADE merupakan adanya keterlibatan masyarakat terutama masyarakat sekitar desa seloharjo, wukirsari dan argosari dalam pelaksanaan SIMMADE.

4) Sumber Daya Manusia

Aspek Sumber daya manusia dalam pelaksanaan SIMMADE mencakup petugas Satpas SIMMADE di Polres Bantul. Dari pengertian tersebut maka faktor sumber daya manusia merupakan kemampuan petugas Kepolisian dalam hal ini petugas Satpas SIMMADE dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat dalam pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi.

1.9 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono(Sugiyono, 2015) definisi operasional dapat diartikan sebagai sebuah atribut, sifat maupun nilai yang berasal dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi dan ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik sebuah kesimpulan. Adapun definisi operasional dalam penelitian kali ini adalah :

Tabel Definisi Operasional

Variabel	Indikator
Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat fasilitas yang mendukung terselenggaranya kegiatan dengan baik 2. Terdapat ruang tunggu yang memadai dan nyaman bagi masyarakat selaku pemohon 1. Adanya tempat/ruang guna mengerjakan ujian tertulis maupun melaksanakan ujian praktik
Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya suatu keterbukaan dalam pelaksanaan SIMMADE dan dapat diakses dengan masyarakat dengan mudah 3. Terdapat keterbukaan biaya pembuatan maupun perpanjangan SIM dan sesuai dengan peraturan yang berlaku 4. Nilai yang terdapat didalam ujian dapat dilihat secara langsung oleh

	masyarakat selaku pemohon pembuatan SIM baru
Partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan SIMMADE tanpa ada paksaan 2. Terdapat animo masyarakat yang besar didalam setiap pelaksanaan kegiatan 3. Masyarakat merekomendasikan layanan serta berkeinginan guna menggunakan kembali layanan
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mampu menjelaskan dan memandu pemohon dalam hal ini masyarakat dengan baik 2. Petugas menjalankan pelaksanaan SIMMADE sesuai dengan protokol dan tata cara sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Petugas dalam melaksanakan kegiatan tidak melakukan pungli
Efektivitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Keberadaan SIMMADE dapat dijadikan alternatif ataupun pilihan masyarakat dalam memperpanjang

	<p>maupun mengajukan pembuatan SIM</p> <p>3. Keberadaann SIMMADE mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperpanjang dan mengajukan pembuatan SIM</p> <p>4. Keberadaan SIMMADE mampu memperluas jangkauan penerbitan SIM di Kabupaten Bantul</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Desain Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan guna menjelaskan mengenai pengaruh transparansi, partisipasi, sumber daya manusia dan fasilitas terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE (SIM Masuk Desa) di Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bantul. Dari tujuan penelitian tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Lebih lanjut Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa metode penelitian sebagai sebuah cara ilmiah guna mendapatkan data guna memenuhi tujuan tertentu. Sedangkan secara lebih rinci metode penelitian kuantitatif merupakan sebuah teknik pengumpulan, pengolahan, analisis serta teknik penyajian data yang dilakukan berdasarkan jumlah objektif guna memecahkan permasalahan yang ada dan juga menguji hipotesis yang ada (Duli, 2019).

Penelitian kuantitatif sendiri merupakan sebuah penelitian yang menekankan kepada data numberik atau data yang dapat dikelola dengan metode statistik. Dalam penelitian kuantitatif pembuktian hipotesis yang ada dapat dilakukan dengan manual atau menggunakan komputer. Dengan statistik maka tingkat, pengaruh maupun efektivitas suatu ubahan terhadap yang lain dapat dinyatakan dengan jelas. Namun guna mencapai hal tersebut instrumen yang adaharus valid sehingga terdapat content validity atau predictive validity (Yusuf, 2014).

Dalam penelitian ini menjelaskan variabel dependen dan independen sehingga tidak hanya menjelaskan mengenai sebab akibat tetapi juga menjelaskan timbal balik yang terjadi antara variabel yang ada. Variabel independen dalam penelitian kali ini adalah Transparansi, partisipasi, sumber daya manusia, dan fasilitas,. Sedangkan dependen variabel dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan SIMMADE. Pada penelitian kali ini menggunakan metode survei dalam memperoleh data primer. Adapun data primer tersebut nantinya digunakan guna mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan SIMMADE. Survey tersebut nantinya dilakukan menggunakan kuesioner yang terstruktur sebagai instrumen guna mendapatkan data.

a. Kuesioner

Kuesioner digunakan dalam penelitian kali ini guna memperoleh data primer. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan ataupun pernyataan secara tertulis dan ditujukan kepada responden yang terlibat(Sugiyono, 2010). Dalam menilai atau memberi jawaban responden memiliki pilihan dan juga kebebasan guna memberi jawaban sesuai dengan realitas atau keadaan yang sebenarnya dilapangan. Adapun jenis

angket yang digunakan dalam penelitian kali ini merupakan jenis angket tertutup dimana skor/penilaian yang ada didalam kuesioner merupakan jawaban. Lebih lanjut penilaian dalam kuesioner sebagai berikut :

Tabel III, Tabel Penilaian Skor Penyataan

Jenis Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

b. Wawancara

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode wawancara yang nantinya digunakan guna melengkapi data yang dibutuhkan. Wawancara merupakan salah satu cara dalam teknik pengumpulan data maupun informasi dari responden dengan cara bertanya secara langsung baik secara tatap muka ataupun melalui media. Menurut Sugiyono (2010) wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih yang digunakan guna mendapat, mengumpulkan dan bertukar informasi hingga nanti dapat dijadikan kesimpulan.

Teknik sampling dalam wawancara kali ini menggunakan teknik *non probability sampling*. Teknik *non probability sampling* menurut Sugiyono (2010) merupakan teknik pengambilan sampel yang

memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi semua unsur maupun anggota populasi guna dipilih menjadi sampel wawancara. Sementara itu dalam teknik *non probability sampling* terdapat beberapa metode diantaranya sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball. Metode *Purpose Sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kali ini. Dimana menurut Sugiyono (2010) merupakan metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Dalam penelitian ini nantinya akan mewawancarai perwakilan dari pihak Kepolisian Resort Bantul yaitu Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi selaku unit yang membawahi SIMMADE. Selain itu narasumber nantinya akan berasal dari petugas yang bertugas secara langsung dilapangan ataupun petugas pengawas yang berada ataupun bertanggungjawab di polres bantul serta masyarakat selaku pemohon penerbitan SIM melalui SatPas SIMMADE. Dalam melakukan wawancara nantinya terlebih dahulu disiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dan nantinya dapat dikembangkan.

c. Dokumentasi

Selain menggunakan kuesioner dan juga wawancara metode dokumentasi juga dilakukan dalam penelitian kali ini. Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2010). Dalam teknik ini nantinya menggunakan sumber data yang bersumber pada dokumen maupun arsip yang terdapat didalam lokasi penelitian maupun yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa buku,

skripsi, jurnal, laporan maupun penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian kali ini

1.10.2 Lokasi survey dan responden

Lokasi penelitian yang dilakukan kali ini berada di Kabupaten Bantul yang masih menjadi wilayah Kepolisian Resort Bantul. Adapun secara rinci lokasi tersebut berada di Desa Wukirsari, Desa Seloharjo dan Desa argosari. Ketiga desa tersebut merupakan desa yang menjadi lokasi pelaksanaan SIMMADE di wilayah hukum Kepolisian Resort Bantul.

Adapun latar belakang memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan lokasi tersebut merupakan lokasi pelaksanaan kebijakan SIMMADE di Kabupaten Bantul. Kebijakan SIM Masuk Desa merupakan kebijakan baru di wilayah hukum Polres Bantul guna menyikapi adanya pandemi Covid-19 dan juga memperluas jangkauan penerbitan sim baru dan perpanjangan SIM C. Kebijakan SIMMADE merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan september. Adapun responden yang ditargetkan merupakan masyarakat yang nantinya akan membuat ataupun memperpanjang SIM C di ketiga lokasi tersebut.

1.10.3 Populasi dan Sampling

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2010) populasi merupakan wilayah yang tergeneralisasi dan terdiri dari subjek maupun objek yang mempunyai

karakteristik tertentu dan ditetapkan peneliti guna dipelajari dan ditarik kesimpulan. Selain itu menurut Spigel (dalam Yusuf, 2014) menyatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan unit mengenai dan darimana informasi yang diinginkan. Dengan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah totalitas dari semua unit yang menjadi subjek penelitian. Populasi dalam penelitian kali ini merupakan masyarakat Pemohon SIM (Surat Izin Pengemudi) di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sejumlah 63.531 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi atau dengan kata lain sampel merupakan populasi terpilih yang mewakili keseluruhan populasi yang ada (Yusuf, 2014). Dalam menentukan sampel pada penelitian kali ini digunakan rumus slovin. Dengan menggunakan rumus slovin maka jumlah populasi yang akurat dan jelas dapat terukur dengan baik. Sampling eror yang digunakan dalam penelitian kali ini sebesar 10% sehingga tingkat keakuratan mencapai 90%. Adapun rumus slovin adalah sebagai berikut :

Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan

n = Sampel

N = Populasi

e = Sampling

Dari rumus tersebut maka dapat diketahui sampel dalam penelitian. Jumlah populasi dalam penelitian adalah sebanyak 63.531 jiwa yang merupakan masyarakat Kabupaten Bantul. Dengan memperhitungkan kelonggaran atau sampling eror sebesar 10% dan dengan hasil dibulatkan guna mendapatkan kesesuaian maka perhitungan sampel pada penelitian kali ini sebagai berikut :

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\&= \frac{63.531}{1 + 63.531 (10\%)^2} \\&= \frac{63.531}{1 + 635} \\&= \frac{63.531}{636} \\&= 99.98 \\&= 100 \text{ (Dibulatkan)}\end{aligned}$$

Sesuai dengan perhitungan dengan menggunakan rumus slovin maka diperoleh 100 responden yang akan menjadi sampel dalam penelitian. 100 sampel tersebut merupakan masyarakat Kabupaten Bantul yang menggunakan layanan SIMMADE di 4 (empat) lokasi penyelenggaraan di Kabupaten Bantul. Adapun pembagian sampel akan dibagi secara rata pada setiap desa dikarenakan lokasi pelaksanaan

SIMMADE terbagi kedalam 4 wilayah Kabupaten Bantul yaitu wilayah barat yang berlokasi di Desa Argosari, selatan berlokasi di Desa Seloharjo, timur berlokasi di Desa Wukirsari dan wilayah utara berada di Desa Banguntapan. Dalam penelitian ini digunakan teknik random sampling yang merupakan teknik untuk mengurangi kesalahan dan ketepatan target..

1.10.4 Pengukuran dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian kali ini menggunakan survei berupa pertanyaan dengan metode kuantitatif yang dikembangkan dari beberapa indikator yang sudah terdapat pada variabel. Kuesioner yang digunakan didalam penelitian kali ini merupakan kuesioner dengan skala tertutup dan menggunakan skala likert guna mengetahui penilaian sesuai dengan keadaan dilapangan. Untuk indikator pada skala likert pada angka 1 berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju dan 5 sangat setuju.

Setelah pengelompokan data dan reduksi maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan analisis data kuesioner menggunakan Analisis Partial Square (PLS). Analisis Partial Square (APS) pada penelitian ini nantinya akan menggunakan alat bantu berupa SmartPLS 3.0, SmartPLS sendiri merupakan salah satu metode alternatif dan juga alat bantu statistic Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasiskan windows. SmartPLS didesain guna menyelesaikan regresi ganda ketika pada data yang dimiliki oleh peneliti memiliki permasalahan seperti ukuran sampel kecil ataupun terdapat data yang hilang.

Alasan peneliti menggunakan PLS karena keunggulan PLS seperti informasi yang dihasilkan efisien dan mudah diinterpretasikan terutama pada model yang hipotesis model. Walaupun dengan sampel yang kecil PLS mampu untuk dijalankan, apalagi dengan sampel yang besar sehingga PLS sangat sesuai dengan yang digunakan pada penelitian ini. Dan yang paling penting bahwa penggunaan PLS tidak terlalu rumit.

a. Outer Model

Spesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikatornya, sering juga disebut dengan outer relation atau measurement model (Jaya & Sumertajaya, 2018). Outer model mendefinisikan karakteristik konstruk dengan variabel manifestnya.

b. Inner Model

Spesifikasi hubungan antar variabel laten yang disebut juga dengan inner relation, serta menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substansif penelitian (Jaya & Sumertajaya, 2018). Tanpa kehilangan sifat umumnya maka diasumsikan bahwa variabel laten dan indikator atau variabel manifest di skala zero means dan unit varian sama dengan satu sehingga parameter lokasi (konstanta) dapat dihilangkan dari model.

